

Matheus Nathanael, S.H.

Email: siagian.matheus@ijrs.or.id

Linkedin: [M.N. Siagian](#)



Profil Singkat

Matheus Nathanael Siagian, atau yang akrab dipanggil Mat, lulus dari program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Pidana. Hingga saat ini, Mat telah dilibatkan di berbagai penelitian hukum seperti penelitian Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, penelitian Kebijakan Pidana dan Kerangka Kelembagaan di Indonesia, serta penelitian Pertimbangan Hukum Penjatuhan Pidana Mati. Selain itu, Mat juga dilibatkan sebagai konsultan dalam penyusunan kebijakan peradilan pidana di berbagai institusi seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kemenkopolhukam, serta BAPPENAS.

Jabatan Saat Ini

Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Pendidikan

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (lulus 2020)

Pengalaman Kerja

1. Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana di IJRS (Juli 2024 - sekarang)
2. Peneliti di IJRS (2020 - Juli 2024)
3. Anggota di Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia (2021 - 2023) [Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia]
4. Anggota di Kelompok Kerja

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. Penelitian Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;

2. Penelitian Pertimbangan Hukum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia;
3. Audit R-KUHAP: Kedudukan Penuntut Umum sebagai Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
4. Audit R-KUHP: Sistem Kodifikasi Hukum Pidana
5. Penyusunan PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Penyusunan PERMA 4/2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Penyusunan PERJA 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
8. Penyusunan PEDOMAN Penuntutan 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
9. Penyusunan PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Milik Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Hasil Publikasi

Buku

1. Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
2. Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
3. AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia
4. Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tulisan di Media

1. Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku. The Conversation. (2023).
<https://theconversation.com/kasus-mario-dandy-salah-kaprah-penerapan-keadilan-restoratif-pemulihan-korban-tidak-boleh-menghentikan-proses-pidana-pelaku-202614>

Pencapaian

1. Mengikuti kegiatan South-East Asia Advocacy Program on Drug Policy yg diselenggarakan oleh RELEASE di London (England) dan Cardiff (Wales), United Kingdom pada 23 Sep – 9 Okt 2023.
2. Menjadi Narasumber Peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2022).
3. Menjadi Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (2022).

4. Menjadi Narasumber Sosialisasi Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum (2022).
5. Menjadi Narasumber Diskusi Publik bertajuk "Kajian Kritis PEDOMAN Penuntutan 11/2021 tentang Penanganan Perkara Narkotika" (2021).
6. Menjadi Pemapar dalam Webinar Sosialisasi Publik PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2020).